

KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK INDONESIA MENGHADAPI KRISIS KEUANGAN GLOBAL TAHUN 2010-2016

By: Laras Seruni Utami
Laras.seruni.utami@gmail.com
Supervisor: Faisyal Rani, S.IP MA
Library of Riau University

Department of International Relation
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru
Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

This present research describes the politics and economics policy of Indonesia toward global economic crisis in 2010-2016. Global economic crisis was happened since 2008 when economic crisis in United States of America. The crisis in United States of America have impact for the world and one of the states that have impacts are Indonesia. Inflation and good price in Indonesia was influenced by this crisis.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the politics and economics policy of Indonesia toward global economic crisis. The theories applied in this research are merchantilism perspective with the decision making theory by Richard Snyder about foreign analyze factors.

The conclusion of the research that the politics and economics policy of Indonesia toward global economic crisis are have done by some policy. In economics scope the policy of Indonesia are have done a moneter policies like moneter stimulations, banking system and balance payment. And in politics policy were done by some policy likes tax allowance and tax amnesty policy and free vissa policy.

Key words: *policy, economics, politics and global crisis*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik tentang kebijakan Indonesia menghadapi krisis keuangan global. Salah satu aspek dalam perwujudan hubungan internasional adalah kerjasama internasional. Dalam kerjasama internasional akan berkumpul segala macam kepentingan nasional negara yang menjalin kerjasama karena kepentingan nasional (*national interest*)

menjadi pertimbangan utama dalam melakukan kerjasama internasional. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan dalam kerjasama internasional adalah seberapa efektif dan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh bersama dari kerjasama internasional.¹ Konsep kepentingan nasional (*national*

¹ DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Rosdakarya. 2014. Hlm 33

interest) yang mendasari terjadinya kerjasama internasional sangat erat kaitannya dengan *power* karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap hal yang mendasar bagi negara untuk bertahan dalam hubungan internasionalnya. Kepentingan nasional menjadi faktor penentu yang mengarahkan para perumus kebijakan untuk menyusun suatu kebijakan luar negerinya. Kebutuhan yang paling mendasar dalam konsep kepentingan nasional suatu negara adalah pertahanan dan militer, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi bangsa.²

Bentuk kerjasama internasional yang sangat umum dilakukan pada saat ini adalah kerjasama ekonomi khususnya perdagangan internasional. Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan perdagangan internasional yang terfokus pada kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA). Perekonomian negara berkembang memang sangat bergantung pada aliran modal yang dialirkan dari negara maju. Kegiatan ini juga memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi perekonomian negara tujuan investasi serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.³ Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara lain yang dilakukan oleh penanam modal asing (investor), baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal di

negara tujuan investasi.⁴ Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penanaman modal asing yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya untuk menjamin keberhasilan dan kondisi kondusifitas investasi, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.⁵

Krisis keuangan global tahun 2008 dimulai dari negara adidaya Amerika Serikat, selanjutnya berimbas pada perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Krisis mulai muncul ketika masyarakat di Amerika hidup dalam pola konsumsi yang berlebihan di luar batas kemampuan (*propensity to consume*). Masyarakat memperbanyak hutang, penggunaan kartu kredit yang berlebihan, dan kredit perumahan yang terhambat. Sebagai akibatnya lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit mengalami kebangkrutan karena tidak dapat membayar hutang pada saat jatuh tempo yang sudah ditetapkan dan kehilangan likuiditas karena piutang perusahaan kepada kreditor telah digadaikan kepada pemberi pinjaman.⁶ Keruntuhan perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brothers dan Goldman Sachs membuat bursa saham Wall Street lumpuh. Krisis terus merambat ke sektor riil dan non-keuangan di seluruh dunia. Krisis ini menyebabkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat Amerika yang selama ini

⁴ <http://www.wikipedia.com/penanamam-modal-asing> diakses tanggal 6 november 2017

⁵ <http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html>. Pada tanggal 5 Maret 2015

⁶ Detik.com/ekonomi diakses tanggal 7 november 2017

² Ibid. Hlm 35

³ Ibid., Hlm 32

sangat konsumtif atas produk-produk dari berbagai negara di dunia. Hal ini juga menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat Amerika Serikat sangat bergantung kepada barang-barang impor.

Sebagai negara dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi dan bergantung pada barang impor, menurunnya daya beli masyarakat Amerika memberikan efek yang sangat besar bagi pasar internasional. Penurunan daya beli selanjutnya juga menyebabkan penurunan daya serap pasar sehingga sehingga produk impor menurun drastis artinya tingkat ekspor ke Amerika menurun drastis. Hal ini tentunya menjadi sangat serius bagi negara-negara pengekspor produk yang mengandalkan eksportnya ke Amerika. Selain tingginya tingkat hutang dan kredit macet, secara garis besar ada enam hal yang menjadi penyebab krisis keuangan global, antara lain :

1. Penumpukan hutang yang sangat besar;
2. Program pengurangan pajak korporasi yang menurunkan pendapatan negara;
3. Besarnya biaya untuk mendanai perang Irak dan Afghanistan;
4. Lembaga pengawas keuangan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) tidak mengawasi *Inter Continental Exchange* (ICE);
5. Keputusan untuk menurunkan suku bunga;
6. Kerugian surat berharga properti.

Krisis ekonomi Amerika selanjutnya menjelma menjadi krisis ekonomi global karena hubungan ekonomi negara-negara di dunia yang saling berkaitan. Oleh karena itu Indonesia juga merasakan dampak dari

krisis ekonomi ini. Sebagai negara yang berkembang tentunya perekonomian Indonesia sangat bergantung pada aliran dana dari investasi asing, dengan adanya peristiwa ini investor tentu akan menarik investasi dari Indonesia untuk menghindari kerugian. Penarikan dana oleh investor asing di Indonesia menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aliran dana investasi yang berpotensi digunakan untuk pembangunan ekonomi Indonesia akhirnya hilang, Perusahaan-perusahaan mengalami penurunan produktifitas dan selanjutnya menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, tingkat pengangguran di masyarakat bertambah. Pemerintah kemudian harus menanggung hutang perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta hutang swasta.

Krisis keuangan global menghadapi perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2010-2016. Tantangan itu terlihat cukup jelas pada awal tahun 2010 yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir berjalan moderat akibat lemahnya kinerja ekspor. Hal itu, terjadi seiring munculnya dampak kebijakan pengetatan moneter setelah BI menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan inflasi. Pemilihan umum Presiden pada tahun 2014 mengantarkan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, maka dalam menghadapi krisis keuangan global, maka beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi adalah dengan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan memacu pertumbuhan investasi asing. Sebagai

negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.⁷

Strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya tarik para investor agar menanamkan modalnya di Indonesia ialah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai.⁸ Bukan hanya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Dalam penelitian mengenai kebijakan ekonomi politik Indonesia menghadapi krisis keuangan global, maka penulis menggunakan pendekatan merkantilisme yang diperkenalkan oleh Jean Boudin dan Thomas Mun. Perspektif Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke 16 dan 18 yang terjadi pada masa-masa negara Eropa melakukan proses membangun negara bangsa (*nation state*). Pemikiran kaum merkantilisme menyatakan bahwa logam mulia merupakan lambang kekayaan utama bangsa agar dapat menumpukkan kekayaannya yang dapat

dimanfaatkan melalui perdagangan internasional.⁹ Kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan teknis merupakan salah satu bentuk peran Pemerintah dalam mengatur perekonomian nasional sebuah negara. Berdasarkan asumsi dari perspektif merkantilisme tersebut maka permasalahan penelitian ini melihat respon sebuah negara melalui pemerintah terhadap perubahan eksternal berupa krisis keuangan internasional yang berdampak pada kondisi kemampuan keuangan sebuah negara. Oleh karena itu cukup tepat peneliti menggunakan perspektif merkantilisme karena penelitian ini fokus melihat pada kebijakan negara Indonesia.

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir. Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan

⁷ <https://www.merdeka.com> diakses tanggal 7 november 2017

⁸ <http://kompas.net>. Keringanan Pajak Investasi Padat Karya. Pada tanggal 21 April 2015

⁹ Mohtar Mas'oed, *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. 1990. Hlm 26

ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan keringanan pajak terhadap investor asing tahun 2015 ini, peneliti menggunakan teori pembuatan kebijakan politik luar negeri yang dikenalkan oleh **Richard Snyder**. Teori **Richard Snyder** membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Menurutnya kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik negara. Baik dibidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan keamanan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar negaranya yaitu dari negara-negara lain atau dari dunia internasional, seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, konflik internasional.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan

masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Jenis penelitian adalah deskriptif yang selaras dengan pendapat Sugiyono (2005), yaitu penelitian yang mengungkapkan atau memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Moleong, Penelitian kualitatif diartikan yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti (lembaga, masyarakat, daerah dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian *library research*. Teknik pengumpulan data dari literatur berupa buku-buku, majalah-majalah surat kabar dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian. Dokumentasi adalah sumber informasi berupa bahan – bahan tertulis atau tercatat berupa arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto menyatakan bahwa “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”. Teknik analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan selama tahun 2009-2014. Tantangan itu cukup mengemukakan bahwa pada awal tahun 2009, sebagai akibat masih kuatnya dampak krisis

¹⁰ Ricard Snyder. *Foreign Policy Decision Making*. 1962. New York: free Pass. 1962

perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan IV 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik.

Kondisi tersebut mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi juga dalam tren menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta berpotensi menurunkan berbagai kinerja positif yang telah dicapai dalam beberapa tahun sebelumnya. Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mencegah turunnya pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam melalui kebijakan stimulus moneter dan fiskal. Berbagai kebijakan yang ditempuh pada tahun 2009-2014 pada dasarnya masih merupakan lanjutan dari serangkaian kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah pada triwulan IV 2008.

Serangkaian kebijakan yang ditempuh tersebut tidak saja berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga memperkuat daya tahan perekonomian domestik, sehingga kegiatan ekonomi dapat kembali membaik sejak triwulan II 2009. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan yang secara sistematis telah ditempuh untuk memperkuat fundamental ekonomi dan keuangan pascakrisis 1997/1998.

Permasalahan struktural juga mewarnai catatan defisit neraca ini, seperti masih terbatasnya jasa transportasi domestik untuk keperluan perdagangan antar negara. Ekonomi global 2013 juga diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan global terkait isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di Amerika Serikat. Gejolak di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing keluar dari negara emerging market menuju negara maju, terutama Amerika Serikat, sejalan dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

Indonesia, yang menjadi salah satu tempat penanaman modal portfolio asing, juga tidak terlepas dari dampak rencana *tapering off* ini, dimana terjadi aliran modal asing yang keluar cukup signifikan dari pasar keuangan domestik. Selain itu, keluarnya aliran modal asing dari Indonesia juga dipicu oleh persepsi negatif investor asing terhadap tekanan inflasi yang sempat tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan defisit transaksi berjalan yang melebar. Keseluruhan hal ini berakibat pada menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Oleh karena itu diperlukan beberapa kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi keuangan global yang belum menentu. Memasuki fase pemulihan ekonomi paska krisis ekonomi global, kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong fungsi intermediasi perbankan guna mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Maka beberapa bentuk kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia Menetapkan Kebijakan Stimulus Moneter

Belajar dari pengalaman dalam dua tahun terakhir, yang diwarnai oleh perubahan perilaku di sektor keuangan serta krisis ekonomi global, dapat ditarik substansi pemikiran bahwa pencapaian stabilitas makroekonomi tidak hanya terkait dengan stabilitas harga, namun juga berinteraksi dengan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, dengan tetap memerhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan perbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil akan terus ditingkatkan guna menciptakan fondasi yang kokoh bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan.

a. Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Moneter

Dalam permasalahan di bidang moneter, maka Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran moneter yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan lainnya, termasuk upaya meredam volatilitas yang berlebihan di pasar valuta asing. Kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan diarahkan untuk memperkuat daya tahan industri perbankan dengan tetap melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan peran intermediasi perbankan.¹¹ Kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 2010 diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan $5\% \pm 1\%$ dengan tetap

memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah, Bank Indonesia akan mengarahkan agar inflasi terus dalam tren yang menurun sehingga berada pada tingkat yang rendah dan sebanding dengan tingkat inflasi negara di kawasan regional yang sudah berada pada kisaran 3%.

b. Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan

Kebijakan pemantapan sistem pengawasan bank akan dicapai di antaranya dengan penyempurnaan dan penguatan metode dan praktek pengawasan berbasis risiko, penguatan ketentuan operasional pengawasan bank, penyempurnaan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, dan peningkatan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia akan dilakukan dengan memantapkan kembali struktur perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha.

Selain itu Bank Indonesia akan memperbaiki ketentuan yang mencakup antara lain mengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisi bank, peran pemilik perorangan/keluarga, serta persyaratan pengembangan usaha. Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang sekaligus dapat digunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil khususnya pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian pasar uang diharapkan menjadi lebih likuid dan

¹¹ Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

bank tidak terlalu bergantung terhadap pendapatan dari penempatan pada instrumen Bank Indonesia. Kedua, peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Peraturan yang akan disempurnakan di antaranya meliputi giro wajib minimum (GWM), optimalisasi dan efisiensi kegiatan operasional bank, kemudahan persyaratan kegiatan valuta yang dapat mendorong pemberian kredit. Bank Indonesia juga akan mendorong terbentuknya institusi yang memiliki fungsi menyediakan basis data kredit per sektor dan per daerah, guna memudahkan bank dalam mengukur risiko. Ketiga, peningkatan peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan penguatan ketahanannya.

Kebijakan untuk perbankan syariah akan ditempuh di antaranya dengan meningkatkan insentif untuk mendorong peningkatan modal, memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak perusahaannya, serta memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM perbankan syariah yang kompeten. Keempat, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pembiayaan keuangan mikro dan penguatan ketahanannya. Kebijakan tersebut akan ditempuh di antaranya dengan, memberikan insentif untuk mendorong peningkatan modal, dan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR yang kompeten, serta mempertegas posisi BPR sebagai *community bank*. Dalam upaya untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, Bank Indonesia akan mengarahkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan. Dalam hubungan tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah memberikan acuan (*benchmark*) biaya dana, biaya *overhead*, premi risiko, dan margin keuntungan. Dengan demikian

bank dapat mengidentifikasi sumber inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi agar penetapan suku bunga kredit menjadi lebih wajar. Efisiensi industri perbankan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pendalaman pasar keuangan.

c. Kebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran nasional ke depan akan tetap diarahkan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan dan mendorong efisiensi kegiatan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut ditempuh melalui tiga langkah utama, yaitu meningkatkan kehandalan dan kemampuan mitigasi risiko sistem pembayaran nilai besar, meningkatkan efisiensi di sisi infrastruktur pembayaran retail, dan meningkatkan aspek keamanan pada industri. Untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur dan kemampuan mitigasi risiko sistem pembayaran nilai besar, Bank Indonesia akan terus mengembangkan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) Generasi II. Pengembangan sistem BI-RTGS Generasi II dimaksudkan untuk menambah fungsi sistem BI-RTGS dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi di sisi penggunaan likuiditas, efisiensi dan mitigasi risiko kebutuhan transaksi antar negara, maupun efisiensi dalam rangka mendukung transmisi kebijakan moneter dan fiskal.

Pengembangan sistem BI-RTGS lebih jauh dimaksudkan untuk mempersiapkan infrastruktur sistem BI-RTGS agar dapat memfasilitasi transaksi *cross-border*, yang ke depan diperkirakan semakin berkembang karena adanya inisiatif pengembangan perekonomian dan pasar keuangan regional yang terintegrasi, seperti MEA pada tahun 2015. Untuk itu, ke depan sistem BI-RTGS tidak lagi

menggunakan mekanisme murni *gross to gross settlement*, tapi sudah mengkombinasikannya dengan sistem *netting*, atau lebih dikenal dengan *hybrid system*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan likuiditas bagi peserta dalam sistem. Untuk meningkatkan efisiensi di sisi infrastruktur pembayaran retail Bank Indonesia akan membentuk struktur kelembagaan sistem pembayaran retail di luar Bank Indonesia dalam bentuk *Self Regulatory Organization* (SRO) dan mendukung penciptaan infrastruktur pembayaran retail dalam format *National Payment Gateway* (NPG). Keberadaan SRO sebagai mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dianggap penting agar industri dapat mengatur aturan main sendiri dari sisi industri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan umum di bidang sistem pembayaran.

2. Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu

Menghadapi kondisi keuangan global yang belum stabil, maka kebijakan pemerintah Indonesia di bidang fiskal adalah dengan adanya kebijakan Pemerintah dengan dukungan persetujuan DPR mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus, baik melalui insentif pajak maupun upaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah pada awal tahun jugamenurunkan harga BBM bersubsidi untuk premium dan solar. Di samping itu, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan sektoral untuk memperkuat

dayatahan perekonomian domestik. Serangkaian kebijakan yang ditempuh tersebut, tidak saja berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, tetapi juga memperkuat daya tahan perekonomian domestik, sehingga kinerja perekonomian mulai membaik sejak triwulan II 2009 sampai dengan tahun 2012.¹²

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh CNN Indonesia, bahwa kebijakan tersebut telah disepakati oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 6 April 2015 dan efektif berlaku 30 hari setelahnya atau per 6 Mei 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu sendiri merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, yang secara otomatis tidak berlaku lagi.¹³ Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu ini juga diatur terhadap wajib pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat lagi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pengaturan mengenai wajib pajak dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang

¹² <http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2015

¹³ <http://www.cnn.news.com>, *Pemerintahan Jokowi tetapkan paket kebijakan menghadapi krisis global*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2015

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu Pasal 8, yaitu:¹⁴

- Atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tata cara Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan

setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari Wajib Pajak dan pembahasan pemenuhan kriteria dan persyaratan fasilitas dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pada saat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu ini mulai berlaku, maka wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas dimaksud. Selanjutnya, terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang pernah

¹⁴ *Ibid.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015.

disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

3. Pemerintah Indonesia Mengesahkan Kebijakan Bebas Visa

Perkembangan kondisi perekonomian global yang masih mengalami tekanan akibat krisis menghadapi perekonomian Indonesia pada beberapa tantangan yang tidak ringan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Tantangan tersebut cukup mengemuka terutama pada awal tahun 2009, akibat masih kuatnya dampak krisis perekonomian global yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008. Ketidakpastian yang terkait dengan sampai seberapa dalam kontraksi global dan sampai seberapa cepat pemulihan ekonomi global akan terjadi, bukan saja menyebabkan tingginya risiko di sektor keuangan, tetapi juga berdampak negatif pada kegiatan ekonomi di sektor riil domestik. Kondisi ini mengakibatkan stabilitas moneter dan sistem keuangan pada triwulan I 2009 masih mengalami tekanan berat, sementara pertumbuhan ekonomi masih dalam tren menurun akibat kontraksi ekspor barang dan jasa yang cukup dalam. Perkembangan yang kurang menguntungkan pada gilirannya telah menurunkan kepercayaan pelaku ekonomi di sektor keuangan dan sektor riil, serta berisiko menurunkan berbagai capaian positif beberapa tahun sebelumnya. Sejumlah kebijakan telah

ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut sepanjang tahun 2009. Kebijakan yang diambil pada prinsipnya merupakan lanjutan dari berbagai kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah sejak triwulan IV 2008. Di tengah kondisi masih kuatnya ketidakpastian di sektor keuangan dan sektor riil, berbagai kebijakann diarahkan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, dan daya tahan perekonomian domestik.

Oleh karena itu bentuk kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan bebas visa masuk terhadap 41 negara asing yang terdiri atas 38 negara 3 wilayah teritorial untuk penduduknya yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 ini terdapat 84 negara yang diberikan kebijakan bebas visa oleh Pemerintah Indonesia. Paket kebijakan bebas visa ini dilakukan dengan tujuan untuk mengundang dan memudahkan warga negara asing masuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Kebijakan bebas visa oleh Pemerintah Indonesia ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan. Kebijakan ini diharapkan pemerintah mampu memberikan dampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Terhadap kebijakan ini batas kunjungan warga asing ke Indonesia yang dibebaskan visa adalah maksimal satu bulan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan di Indonesia.

Akan tetapi sampai dengan saat ini terdapat 174 negara di dunia yang diberikan bebas visa kunjungan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa negara yang diberikan kebijakan bebas visa ini adalah negara yang terletak di benua

Australia, Amerika Selatan dan Afrika seperti Australia, Braziln Ukraina, kenya, Pakistan, Macedonia, Mozambik, Guatemala, Mauritania dan Paraguay. Sedangkan ada beberapa negara yang tidak diberikan bebas visa oleh Indonesia hal ini dikarenakan negara tersebut aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrim. Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru dalam perkembangan ideologi radikal.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa kebijakan bebas visa ini dilakukan untuk meningkatkan devisa negara melalui kunjungan warga negara asing ke Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2015 adalah sekitar 10.406.759 orang dan sampai tahun 2017 terjadi peningkatan 7,2% kunjungan wisatawan mancanegara sekitar 12.067.543 orang. Sedangkan tempat destinasi wisata prioritas di Indonesia adalah Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Tanjung Kelayang yang merupakan tempat kunjungan destinasi wisata yang cukup menarik di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global adalah dengan melaksanakan kebijakan penguatan keuangan dibidang moneter dan fiskal. Krisis keuangan global merupakan sebuah krisis ekonomi yang bersifat sistemik, hal ini terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi local di Amerika Serikat yang akhirnya berakibat pada kemampuan keuangan Amerika Serikat sehingga berdampak pada kondisi keuangan dunia terutama terhadap negara-negara mitra ekonomi

Amerika Serikat termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan sebuah kebijakan ekonomi guna menghadapi krisis keuangan global di Indonesia baik yang bersifat ekonomi ataupun politik. Kebijakan ekonomi politik Indonesia menghadapi krisis keuangan global ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan ekonomi tertutup terhadap pasar ekonomi lokal artinya menguatkan peran pemerintah dalam intervensi pasar sedangkan untuk lingkungan internasional pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau liberal.

Dalam bidang ekonomi pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menerapkan kebijakan paket stimulus ekonomi dan menerapkan kebijakan pengawasan bank sentral yaitu Bank Indonesia terhadap likuiditas dan pergerakan pasar ekonomi di Indonesia. Sedangkan kebijakan dibidang politik dilakukan dengan menerapkan kebijakan fiskal yaitu dengan mengesahkan kebijakan keringanan pajak melalui paket kebijakan Pemerintah Indonesia dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu. Dimana paket keringanan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap investasi di Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 juga menerapkan kebijakan kebebasan visa bagi 174 negara sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan bebas visa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang nantinya mampu meningkatkan devisa Indonesia dari wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Cox. RW. 1981. *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory*, Millenium, Vol 10 No 2.1981.

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2010. Laporan ekonomi dan keuangan Indonesia Kwartal I tahun 2010.
- Bhagwati. 1996. *The economic of underdevelopment countries*. New York. Mc graw Hill
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Persada.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Laporan Tahunan Keuangan Republik Indonesia 2015*. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. 2012. *Buku Kegiatan Tahunan dan Angka Perdagangan*. Kementerian Perdagangan dan perindustrian.
- Kementerian keuangan. 2009. *Buku pegangan Pemerintah Daerah. Penguatan ekonomi daerah. Langkah menghadapi Krisis keuangan Global*. Jakarta.
- Kindleberg, Charles P. 1982. *Ekonomi Internasional II*. Jakarta. Aksara Baru.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Analisa Politik*. PT Gramedia. Jakarta. Hlm 52
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial.
- Moelino, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Plano, Jack C. 2001. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin.

_____. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka.

Snyder, Richard. 1962. *Foreign Policy Decision Making*. New York: free Pass.

Sukma Rizal. 1999. *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship*. London: Routledge.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang No.6 tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Website

<http://www.jbs.co.id/penanaman-modal-asing-pma-menuperijinan-95.html>. Pada tanggal 5 Maret 2015

<http://www.indonesia-invesment.com.ekonomi domestik Indonesia triwulan I tahun 2008>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2015